

***THE INFLUENCE OF GOOD GOVERNANCE AND GOVERNMENT
ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT
FINANCIAL REPORTS IN KAB. MOJOKERTO***

**PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA
KAB. MOJOKERTO**

Fahrizal Akhmad Zein¹, Titiek Rachmawati², Nekky Rahmiyati³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1222000064@sirel.untag-sby.ac.id¹, titiekrachmawati@untag-sby.ac.id², nekky@untag-sby.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of implementing good governance and implementing Government Accounting Standards on the quality of Mojokerto Regency Financial Reports. The research method used is a quantitative descriptive method by distributing questionnaires to Regional Working Unit who are included in the research sample. This research covers all Regional Working Unit in Mojokerto Regency, totaling 47 Regional Working Unit. Sample determination was carried out using the purposive sampling method. The total sample used was 19 Regional Working Unit. Data collection was carried out using a questionnaire that had been tested for validity and reliability. The number of questionnaires distributed was 59 questionnaires which were filled in by the accounting or finance staff of each Mojokerto Regency Regional Working Unit. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of this research show that in Regional Working Unit Mojokerto Regency, the implementation of Government Accounting Standard has a positive and significant effect on the quality of the Mojokerto Regency Financial Report (LKPD). The good governance variable has a significant negative influence. Meanwhile, simultaneously it has a significant effect on the quality of the Financial Report. By determination, the R square value or coefficient of determination is 14.3%, which means that the variables implementing good governance and implementing Government Accounting Standards are able to explain the influence on the quality financial report as much as 14.3% and the rest is influenced by other variables that were not used in this research.

Keywords: *Implementation of Good Governance, Government Accounting Standar implementation, Financial Report Quality*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good governance* dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada PD yang termasuk ke dalam sampel penelitian. Penelitian ini meliputi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 47 PD. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Total sampel yang digunakan adalah 19 PD. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Jumlah angket atau kuesioner yang disebar adalah sebanyak 59 angket yang diisi oleh staff akuntansi atau

keuangan masing masing PD Kabupaten Mojokerto. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada PD Kabupaten Mojokerto penerapan SAP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mojokerto. Untuk variabel *good governance* memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Secara determinasi diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 14,3% yang berarti variabel penerapan *good governance* dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mampu menerangkan atau menjelaskan pengaruh terhadap kualitas LKPD sebanyak 14,3% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini

Kata Kunci: Penerapan *good governance*, Penerapan SAP, Kualitas LKPD.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang semestinya menjadi bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap masyarakatnya belum mampu untuk menggambarkan aktivitas pemerintah secara umum (Baihaqi, 2018). Permasalahan yang kerap ditemui adalah ketidaksesuaian informasi keuangan yang disusun dengan fakta yang ada, ketidak sesuaian format penyusunan dengan standar akuntansi keuangan yang ada, dan penyimpangan yang terjadi seperti masih adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini juga didukung pernyataan dari Kanwil Direktorat Jendral Pembendaharaan (DPJb) yang menyebutkan bahwa masih kerap ditemui tantangan terkait kualitas data dan ketepatan waktu penyampaian data pemerintah daerah secara berkala. Sehingga diperlukan pembenahan data atau laporan yang berkaitan dengan keuangan, terutama untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan tersebut.

Rachmawati, T. dan Solikhah L. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility menyebutkan bahwa tata kelola

perusahaan yang baik jika diterapkan lebih sering dapat berpengaruh pada pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam bentuk keberlanjutan yang berdampak pada pencapaian akuntabilitas dan penerapan legitimasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Penelitian dari Yanti, N.S (2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan secara simultan penerapan SAP, pemanfaatan SIA, dan pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung penelitian dari Julitha, R. K & Maulidah Narastri (2023) yang menyebutkan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan PSAP No. 13 memberikan informasi yang tepat dan transparan kepada masyarakat. Objek yang diteliti juga

berhasil memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mojokerto menunjukkan masih terdapat beberapa temuan pemeriksaan yang mengindikasikan masih adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Namun temuan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Dalam LHP tersebut BPK memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atas 11 temuan yang ada. Temuan temuan tersebut diantaranya (1) Penetapan target PAD belum berdasarkan asumsi mikro, (2) Pengelolaan pajak daerah belum tertib, (3) Penganggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada 6 SKPD sebesar Rp 3.139.731.731,00 tidak tepat, (4) Kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas RSUD Prof. dr. Souekandar, (5) Pertanggung jawaban distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum memadai, (6) Pengendalian atas pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum belum memadai, (7) Kekurangan volume atas 8 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada 5 SKPD, (8) Waktu penyaluran dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa belum sesuai ketentuan, (9) Penatausahaan persediaan belum tertib, (10) Divestasi PT RBU belum selesai dilaksanakan, (11) Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib.

Peneliti menilai bahwa ada urgensi mengenai penulisan yang

memiliki tujuan akhir yaitu : pertama, untuk menguji apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; Kedua, untuk menguji apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; Ketiga, untuk menguji apakah *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti memiliki harapan terhadap hasil penelitian yaitu : Pertama, diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi disiplin keilmuan dibidang akuntansi khususnya dan seluruh disiplin keilmuan secara umum terkait pengaruh penerapan tata kelola yang baik dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan; Kedua, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang pengaruh penerapan tata kelola yang baik dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Ketiga, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan kedepannya untuk memperbaiki kualitas laporan keuangannya; terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya mengenai tema yang serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan

suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Berdasarkan pengertian diatas akuntansi sektor publik merupakan suatu alat penyedia informasi bagi publik terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja. Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) secara umum tujuan akuntansi pemerintah adalah memberikan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan atas transaksi yang dilakukan pada periode tertentu. Tujuan akuntansi pemerintah secara khusus dijelaskan oleh Hasanah dan Fauzi (2017), antara lain : Akuntabilitas; Manajerial; dan Pengawasan.

Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode tertentu. Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat dan daerah terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan

Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi para penggunanya, maka informasi yang ada pada laporan keuangan harus berkualitas dan dapat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar tujuannya dapat terpenuhi. Ukuran normatif yang harus dipenuhi agar sebuah laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya tersebut antara lain : Dapat Dibandingkan; Andal; Relevan; dan Mudah Dipahami

Good Governance

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) mengemukakan arti good dalam good governance mengandung dua arti yakni nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dan yang kedua yakni aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Kusmayadi, Rudiana, dan Badruzaman (2015) *Good Governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang baik dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran penerapan *good governance* menurut Mahsun (2018) diantaranya : Pertama, Transparansi (Transparency) yakni prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga objektivitas dalam suatu pemerintahan; Kedua, Akuntabilitas (Accountability) merupakan prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan wajar. Sehingga perusahaan / pemerintahan harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; Ketiga, Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Standar Akuntansi Pemerintahan

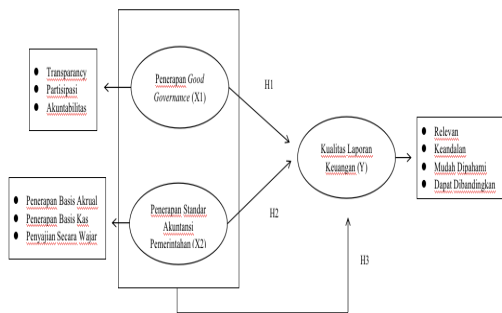
Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip prinsip

yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten, pengungkapan, lengkap dan penyajian wajar.

Menurut Hasanah & Fauzi (2017:2) Dalam Standar Akuntansi Pemerintah terdapat tiga tujuan yakni : Pertama, tujuan akuntabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 23 ayat 5, menetapkan bahwa proses pemeriksaan tanggung jawab tentang Keuangan Negara hanya diadakan pada suatu Badan Pemeriksaan Keuangan. Akuntansi pemerintah dibuat guna memenuhi semua berkas laporan pertanggungjawaban masalah keuangan negara tersebut. Selain itu, untuk perihal standar akuntansi ini juga terkait dengan amanat dari konstitusi. Pada intinya, untuk pemangku kekuasaan terbesar kali ini berada di standar akuntansi pemerintahan; Kedua, tujuan manajerial yang mewajibkan negara untuk membuat anggaran dengan terencana dan tercatat secara baik dan benar. Sehingga, dengan adanya tujuan dari standar akuntansi pemerintahan ini dapat membantu pemerintah dalam menjalankan sebuah rencana. Selain itu, tujuan manajerial juga memastikan lagi kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya sekedar itu saja, akan tetapi untuk tujuan manajerial mempunyai keterkaitan dengan efektifitas dan efisiensi. Ketiga; tujuan pengawasan yakni standar akuntansi pemerintahan yang paling akhir. Akuntansi pemerintah dirancang sedemikian baiknya guna mempermudah dalam proses pemeriksaan keuangan dari negara

tersebut. Selain itu, tujuan pengawasan digunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran di beberapa unit kerja tertentu. Akuntansi pemerintah juga dapat digunakan untuk mengukur kebutuhan negara yang dapat dijadikan sebagai pedoman menerbitkan beberapa anggaran selanjutnya.

HIPOTESIS PENELITIAN



Gambar 1. Kerangka Berpikir

H1 : Terdapat pengaruh antara variabel penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H2 : Terdapat pengaruh antara variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H3 : Terdapat pengaruh antara variabel penerapan *good governance* dan penerapan standar akuntansi pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
 Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien Regresi

X_1 = Penerapan *Good Governance*

X_2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

e = Tingkat Error

METODE PENELITIAN

Peneliti hendak mengetahui pengaruh penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat daerah (PD) yang ada di Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 47 perangkat daerah (PD), sementara sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 19 perangkat daerah (PD) yang terdiri dari dinas dan badan. Alasan peneliti hanya mengambil 19 PD sebagai sampel yaitu untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Dari setiap PD akan diambil sejumlah responden dengan kriteria responden berasal dari kasubag keuangan dan staff keuangan/akuntansi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner atau angket yang berisi pernyataan yang telah disusun untuk mengetahui jawaban dari responden terkait variabel pengaruh penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Jawaban dari responden akan diukur menggunakan skala likert untuk nantinya dianalisis

menggunakan alat analisis SPSS

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km² atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47" Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan "Gerbang Kertosusila". Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan yang masing masing dibentuk dengan beban kerja yang disesuaikan dan perincian tugas & fungsi untuk membantu efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Sebagai pengguna anggaran perangkat daerah yang bersangkutan menjalankan tugasnya dengan melaksanakan program kerja yang telah disusun sesuai dengan bidang tugas, setiap perangkat daerah pada tiap akhir periode akan melaporkan laporan keuangannya untuk nantinya di konsolidasi dan disusun

menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD).

Demografi Kabupaten Mojokerto

Penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.141.516 jiwa. Dengan luas total 692,15 km² maka dapat diketahui bahwa rata rata kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah 1.617/km². 96,63% penduduknya merupakan pemeluk agama islam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per 2021 Kabupaten Mojokerto adalah 74,15 yang termasuk dalam kategori tinggi.

Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto

Visi Kabupaten Mojokerto yakni : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara untuk Misi dari Kabupaten Mojokerto dibagi menjadi 4 yakni : Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai nilai keimanan dan ketakwaan; Kedua, membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan; Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan; Keempat, pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Hasil Analisis Data

Descriptive Statistics

Penelitian ini menggunakan dua variabel independent yaitu penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintah, sementara variabel dependent yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTALX1	59	30	45	39.54	2.555
TOTALX2	59	27	40	35.15	2.280
TOTALY	59	32	40	35.58	1.840

Valid N (listwise) 59

Variabel X1 penerapan *good governance* memiliki 59 responden dengan nilai minimum 30, nilai maximum 45 dan nilai rata rata jawaban responden 39,54 dengan standar deviasi 2,555. Sementara, variabel X2 penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki 59 responden dengan nilai minimum 27, nilai maximum 40 dan nilai rata rata jawaban responden 35,15 dengan standar deviasi 2,280. Variabel dependent kualitas laporan keuangan memiliki 59 responden dengan nilai minimum 26, nilai maximum 40 dan nilai rata rata jawaban responden 35,36 dengan standar deviasi 2,295.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9
Pearson Correlation	0,65	0,663	0,475	0,670	0,385	0,468	0,335	0,517	0,458
Sig. Korelasi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,010	0,000	0,000
Keterangan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid
Variabel	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
Pearson Correlation	0,599	0,598	0,410	0,509	0,336	0,566	0,625	0,459	
Sig. Korelasi	0,000	0,000	0,001	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	
Keterangan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	
Variabel	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	

Pearson Correlation	0,646	0,622	0,452	0,663	0,323	0,596	0,362	0,509
Sig. Korelasi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,000	0,000	0,005
Keterangan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian atau butir pernyataan memenuhi kriteria valid yang dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang diperoleh bersifat objektif dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,648	Reliable
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,602	Reliable
Kualitas Laporan Keuangan	0,619	Reliable

Tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* pada masing masing dengan pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian ini *reliable* karena masing masing variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik

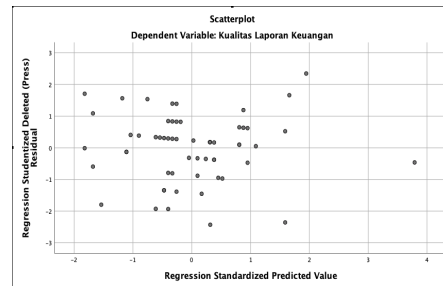
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Residual
N	59
Normal Parameters,b	Mean .0000000
	Std. Deviation 1.81492977

Most Extreme Absolute Differences	.098
Positive	.063
Negative	-.098
Test Statistic	.098
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200c,d

Tabel diatas menunjukkan hasil uji kolmogrov-smirnov yang dilakukan pada variabel memiliki nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan melihat grafik histogram dan p-plot serta hasil uji kolmogrov smirnov maka model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Coefficientsa			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Good Governance	.342	2.293
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.342	2.293

Tabel diatas menunjukkan hasil uji multikolinieritas variabel peneapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai VIF 2,293 dan nilai toleransi sebesar 0,342. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai *tolerance* $0,342 > 0,10$ dan nilai VIF $2,293 < 10$.



Heterokedatisitas terjadi apabila dalam scatter plot titik titiknya mempunyai pola yang teratur. Dari scatterplot pada gambar diperoleh bahwa titik titik penyebaran berada diatas dan dibawah sumbu Y dan tidak memiliki pola yang teratur. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penerapan good governance (X1) dan penerapan standar akuntansi pemerintah (X2) tidak terjadi heterokedatisitas

Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	35.676	1.617
	Penerapan Good Governance	-.194	.067
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.216	.075

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah : $Y = 35,676 - 0,194X_1 + 0,216X_2$

Pengujian Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	35.676	1.617			22.063	.000
	Penerapan Good	-.194	.067	-.618		-2.921	.005

Governance					
Penerapan	.216	.075	.612	2.895	.005
standar					
akuntansi					
pemerintah					

1. Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independent. Dimana signifikasinsi dari variabel penerapan *good governance* (X1) adalah sebesar $0,005 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Mojokerto.

2. Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independent. Dimana signifikasinsi dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X2) adalah sebesar $0,005 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Mojokerto.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.357	2	2.678	4.67	.013 ^b
	Residual	32.116	56	.573		
	Total	37.472	58			

3. Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan dari hasil uji F pada tabel 4.10 dapat dilihat nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,013 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *good governance* (X1) dan standar akuntansi pemerintahan (X2) secara bersama sama (simultan) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.378 ^a	.143	.112	.757

Dari hasil uji diatas, koefisien determinasi dilihat dari nilai R square yakni sebesar 0,143 atau 14,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel variabel independent dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 14,3 % sedangkan sisanya yaitu 85,7% dijelaskan oleh faktor faktor selain variabel yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh secara negatif signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena lingkungan politik yang tidak stabil dan senantiasa berubah ubah sehingga pengimplementasian prinsip *good governance* tidak dapat dilakukan secara konsisten. Penerapan *good*

governance bisa saja bukan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Harjito (2022) yang menyatakan bahwa penerapan GCG akan berdampak pada semakin baiknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan Harjito, dkk tersebut hal ini disebabkan karena minimnya penyimpangan yang terjadi.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan. Penelitian ini menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah memberikan kerangka kerja yang konsisten dan terstandarisasi untuk penyusunan laporan keuangan

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nanda S.Y (2020) dan Ivan Yudianto (2018) yang menyatakan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dan mampu menjelaskan bagaimana semestinya laporan keuangan disusun dan disajikan.

Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Mojokerto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menjelaskan bahwa tata kelola yang baik yang dibarengi dengan pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintah mutlak dilakukan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azlim (2013) yang menyatakan bahwa secara simultan, penerapan *Good Governance* dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh. Pada SKPD di Kota Banda Aceh, penerapan *good governance* telah dilakukan dengan baik yang meliputi transparansi informasi keuangan dan non keuangan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Sementara, variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki

pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$; Kedua, hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa penerapan *good governance* dan penerapan standar akuntansi pemerintah bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan nilai signifikan $0,013 < 0,05$; Ketiga, hasil pengujian secara determinasi dinyatakan bahwa variabel penerapan *good governance* dan penerapan standar akuntansi pemerintah mampu menerangkan atau menjelaskan pengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang. Dengan melihat nilai R Square atau Koefisien Determinasi sebesar 14,3% namun pengaruh nya tidak mencapai 100% kemungkinan masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang peneliti tidak teliti. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambah jumlah sampel penelitian dan jumlah responden sehingga lebih mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dan adanya tambahan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah, dan profesionalisme auditor

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Deddi Nordiawan dan Hertianti, 2014. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Salemba Empat : Jakarta
- Azlim, Darwanis, dan Abu Bakar, Usman, 2013. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi Vol 1, No. 1
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Mojokerto TA 2022*.
- Evicahyani, S.I dan Setiawina, N.D, 2015. *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan*. E-Jurnal ekonomi dan Bisnis Unud 3.1
- Harjito, Y., Gete, O.T., Sugiarti, 2022. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol 15, No. 1
- Kusuma, J. R., & Narastri, M, 2023. *Implementasi PSAP Nomor 13 Pada Penyajian dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Puskesmas Modopuro*. Student Research Journal, 1(2), 68-77
- Mahsun, Mohammad, 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi*

- Pemerintahan*. Jakarta : Legalitas
- Sholikhah, L. & Rachmawati, T, 2022.
Pengaruh Profitabilitas dan Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2(3), 337-348.
- Yanti, N. S., & Made, A., 2020.
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1)